

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tujuan umum dari perusahaan adalah untuk mempertahankan laba agar kelangsungan hidup perusahaan dapat berjalan terus, untuk mencapai tujuan tersebut manajemen perusahaan dihadapkan pada berbagai masalah baik internal maupun eksternal. Masalah internal adalah perkembangan perusahaan sendiri, sedangkan masalah eksternal adalah persaingan usaha yang semakin tajam dan kondisi perekonomian yang tidak menentu sehingga diperlukan adanya manajemen yang solid dan efektif.

Dalam pelaksanaan kegiatan setiap perusahaan, baik yang bergerak dalam bidang industri maupun jasa selalu berusaha untuk mendapatkan laba, dengan laba yang diperoleh berarti perusahaan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kemampuan untuk mengelola pendapatan dan penagihannya secara efektif sehingga perkembangan dan kontinuitas usaha akan berlangsung dengan baik. Bagi perusahaan, pendapatan merupakan salah satu sarana penting untuk memperoleh laba, sedangkan penagihan adalah usaha perusahaan untuk memperoleh penerimaan kas dari pendapatan yang dilakukan secara kredit. Untuk memperoleh pendapatan (*revenue*) biasanya perusahaan melakukan transaksi penjualan baik secara tunai maupun kredit. Sebagai akibat penjualan secara kredit tersebut maka akan timbul piutang (*receivable*) baik piutang dagang maupun jasa.

Dengan adanya piutang, perusahaan harus mengefektifkan penagihannya dengan terpadu yang diharapkan dapat menghasilkan penerimaan dari pendapatan secara nyata (tunai).

Dalam pencapaian tujuan yang telah direncanakan atau yang telah ditetapkan oleh perusahaan, manajemen harus melakukan suatu pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan karena suatu pengendalian tidak dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya suatu pengendalian internal yang baik. Pengendalian yang dilaksanakan perusahaan harus efektif, sehingga dapat membantu manajemen dalam menjalankan keamanan asset perusahaan.

PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk DIVRE III. berbeda dengan perusahaan-perusahaan publik lainnya di Indonesia. TELKOM adalah perusahaan publik yang berlatar belakang perusahaan negara (Badan Usaha Milik Negara - BUMN) dan sahamnya tercatat di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) serta beberapa bursa di luar negeri, yakni di *New York Stock Exchange (NYSE)*, *London Stock Exchange (LSE)* dan diperdagangkan tanpa tercatat (POWL) di Jepang.

PT. Telekomunikasi Indonesia DIVRE III berstatus perseroan terbuka yang mempunyai peranan sangat penting dalam penyedia jasa telekomunikasi, yaitu bisnis *information dan communication (infoCom)* dengan menyediakan layanan penuh (*Full Services and Network Provider*) bidang informasi dan komunikasi, dimana perubahan dan perkembangan perekonomian mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap aktivitas piutang usaha yang ada di PT. Telekomunikasi Indonesia DIVRE III.

Penjualan produk dan pelayanan TELKOM baik pelayanan jasa personal maupun jasa korporat tentunya akan menimbulkan piutang dari pihak-pihak tertentu antara lain; piutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu departemen pemerintahan maupun badan usaha milik negara (BUMN) lainnya, piutang pihak ketiga yaitu masyarakat maupun perusahaan-perusahaan swasta dan piutang lain-lain.

Mengingat piutang usaha merupakan unsur yang penting dalam pengelolaan *cashflow* perusahaan, maka fungsi pemeriksaan yang ada di dalam perusahaan perlu dioptimalkan kembali untuk mengontrol aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan piutang usaha. Prosedur yang wajar dan cara pengamanan yang cukup terhadap piutang ini adalah penting bukan saja untuk keberhasilan perusahaan, tetapi juga untuk memelihara hubungan yang memuaskan dengan para pelanggan. Hal tersebut diharapkan dengan adanya pemeriksaan internal maka pengendalian atas piutang usaha pada PT. Telekomunikasi Indonesia DIVRE III yang saat ini jumlah piutangnya yang cukup besar dengan adanya peningkatan piutang tak tertagih selama tiga tahun terakhir akan menjadi lebih baik.

Mengingat pentingnya pemeriksaan internal untuk mendukung pengendalian dalam piutang usaha maka dalam pelaksanaan penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul **“PENGARUH PEMERIKSAAN INTERNAL DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL PIUTANG USAHA PADA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA DIVRE III”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan internal di PT. Telekomunikasi Indonesia DIVRE III?
2. Bagaimana pelaksanaan pengendalian internal piutang usaha di PT. Telekomunikasi Indonesia DIVRE III?
3. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal piutang usaha di PT. Telekomunikasi Indonesia DIVRE III?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan untuk memahami pengaruh pemeriksaan internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal piutang usaha, untuk dibandingkan dengan teori yang telah Penulis dapatkan.

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan sehubungan dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan pemeriksaan internal di PT. Telekomunikasi Indonesia DIVRE III.
2. Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan pengendalian internal piutang usaha di PT. Telekomunikasi Indonesia DIVRE III.

3. Untuk mengetahui dan menilai seberapa besar pengaruh pemeriksaan internal dalam menunjang efektivitas pengendalian internal piutang usaha pada PT. Telekomunikasi Indonesia DIVRE III.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini penulis harapan dapat memberikan manfaat bagi pihak :

1. Penulis

Bagi penulis diharapkan dapat menjadi pelengkap wawasan pengetahuan teoritis yang terdapat dalam literatur-literatur selama mengikuti perkuliahan, umumnya bidang pengauditan dan khususnya tentang pemeriksaan internal terkait dengan piutang usaha dan membandingkan aplikasinya terhadap efektivitas pengendalian internal piutang usaha yang terjadi di PT. Telekomunikasi Indonesia DIVRE III tempat penulis melakukan penelitian, serta sebagai salah satu syarat tugas akhir atau skripsi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.

2. Pihak Perusahaan

Bagi perusahaan sebagai bahan masukan yang bermanfaat dan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang berguna bagi perusahaan untuk menyempurnakan langkah-langkah selanjutnya dalam menentukan kebijakan *internal auditing* dan pengaruhnya terhadap efektivitas pengendalian internal piutang usaha.

3. Peneliti Lain

Bagi peneliti lain diharapkan menjadi bahan referensi dan dapat digunakan sebagai titik tolak bagi penelitian yang lebih luas dan mendalam sebagai pengetahuan dan informasi tambahan dengan topik yang sama.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Semakin berkembangnya kegiatan usaha suatu perusahaan yang didukung oleh teknologi yang semakin maju akan menuntut pihak manajemen untuk bekerja dalam dunia yang berada di lingkungan operasi fisik yang terkontrol serba cepat. Sehingga manajemen harus dapat memanfaatkan informasi secara optimal, baik menyangkut waktu, jenis dan kualitasnya. Karena dengan informasi tersebut manajemen akan dapat mengambil keputusan secara cepat dan akurat melalui pendekatan-pendekatan dan pemecahan-pemecahan masalah kompleks yang ada.

Untuk kebutuhan itulah diperlukan suatu alat yang berdiri sendiri yang dapat membantu pihak manajemen untuk memeriksa dan mengevaluasi aktivitas perusahaan yang sedang berjalan, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan adanya suatu pemeriksaan. Bentuk pemeriksaannya adalah pemeriksaan internal yang fungsinya untuk menilai efektifitas sebuah perusahaan yang melibatkan berbagai macam kegiatan atau aktivitas perusahaan. Adapun pengertian pemeriksaan internal menurut **Mulyadi** yaitu :

“Pemeriksaan internal merupakan kegiatan penilaian yang bebas dan terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi keuangan dan kegiatan lain untuk memberikan jasa kepada manajemen.”

(2002: 29)

Definisi pemeriksaan internal menurut **Elder, Beasley and Arens** adalah :

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s. it helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes.”

(2006: 836)

Dari semua definisi audit internal di atas, akan terlihat bahwa audit internal memerlukan kebebasan dalam melaksanakan pemeriksaan. Kebebasan pemeriksaan adalah status khusus yang terdapat dalam organisasi dan audit internal mendapat status tersebut dari pihak manajemen. Kegiatan pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi keuangan dan kegiatan lain untuk memberikan jasa kepada manajemen salah satunya kegiatan yang menyangkut masalah piutang usaha. Piutang yang telah jatuh tempo dan tidak dapat tertagih akan mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian, karena sebagian aktiva perusahaan tidak dapat di uangkan. Agar pengendalian piutang usaha dapat terlaksana dengan baik, maka fungsi pemeriksaan harus independen dari aktivitas yang diperiksa dalam arti tidak terlibat dalam kegiatan operasi perusahaan, sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen. Independensi dalam pemeriksaan internal menurut **Sawyer** yang diterjemahkan oleh **Desi Adhariani** adalah :

- 1. Bebas dari intervensi manajerial atas program audit.**
- 2. Bebas dari segala intervensi atas prosedur audit.**
- 3. Bebas dari segala persyaratan untuk penugasan audit selain yang memang untuk sebuah proses audit.”**

(2005: 35)

Adapun tujuan dari pemeriksaan internal menurut **Sukrisno Agus** adalah sebagai berikut :

“Tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh audit internal adalah untuk membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisa, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya.”

(2004: 222)

Seorang pemeriksa internal harus berada diluar lini perusahaan. Tetapi tidak lepas dari kesatuan tersebut sejauh masih terjalin hubungan karyawan dan majikan. Pemeriksaan internal berkewajiban memberikan keterangan-keterangan yang berharga kepada manajemen untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan operasi perusahaan.

Untuk mencapai tujuan *Audit Internal* harus melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti yang dikemukakan **Mulyadi** sebagai berikut:

- “a. Pemeriksaan dan penilaian terhadap baik atau tidaknya pengendalian administrasi dan mendorong penggunaan cara-cara yang efektif dengan biaya minimum**
- b. Menentukan sampai seberapa jauh pelaksanaan manajemen puncak dipatuhi**
- c. Menentukan sampai seberapa jauh kekayaan perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari segala macam kerugian**
- d. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh bagian dalam perusahaan**
- e. Memberikan rekomendasi perbaikan kegiatan-kegiatan perusahaan.”**

(2002: 105)

Adapun unsur-unsur yang harus dimiliki dalam *Audit Internal* yang dijelaskan oleh **Guy, Alderman and Alan** diterjemahkan oleh **Paul A. Rajoe** adalah sebagai berikut:

“a. Independensi

Audit internal harus mandiri dan terpisah dari kegiatan yang diperiksanya.

b. Kemampuan Profesional

Audit internal harus mencerminkan keahlian dan ketelitian profesional.

c. Lingkup pekerjaan

Lingkup pekerjaan pemeriksa internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan serta efektivitas sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan.

d. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian, serta pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan menindaklanjuti (*follow up*).”

(2002: 414)

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pemeriksaan internal adalah sebagai berikut:

- a. Independensi
- b. Kemampuan Profesional
- c. Lingkup Pekerjaan
- d. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan
 - Perencanaan atau program pemeriksaan
 - Pengujian dan pengevaluasian informasi
 - Penyampaian hasil dan rekomendasi
 - Tindak lanjut

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa pemeriksaan internal merupakan suatu bentuk pemeriksaan yang bertujuan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam bidang operasional yang akan mempengaruhi efektifitas

perusahaan dan membantu manajemen dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.

Skousen, Albreth, Stice dan Stice yang diterjemahkan oleh Thomson

Learning adalah :

“Pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang digunakan oleh manajemen untuk memenuhi tujuannya; umumnya dibagi kedalam pemisahan tugas yang cukup, prosedur yang tepat untuk otorisasi dari transaksi dan kegiatan, cukup dominan dan pencatatan, kontrol fisik atas aktiva dan pencatatan, kontrol fisik atas aktiva dan catatan, pengecekan independen atas kinerja.”

(2001: 260)

Sedangkan definisi piutang menurut Mulyadi adalah sebagai berikut :

“Piutang merupakan klaim kepada pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu satu tahun, atau dalam satu siklus kegiatan perusahaan. Piutang usaha adalah piutang yang timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa dalam kegiatan normal perusahaan.”

(2002: 87)

Jadi, piutang merupakan salah satu pendapatan dari suatu perusahaan yang membutuhkan waktu untuk memilikinya sampai berubah menjadi kas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian piutang merupakan aktivitas manajerial dalam memonitor pelaksanaan rencana dan melakukan tindakan perbaikan yang dibutuhkan atas seluruh klaim atau tuntutan suatu perusahaan dalam bentuk uang kepada pihak lainnya sebagai akibat dari aktivitas penjualan barang atau pemberian jasa perusahaan secara kredit kepada pihak lain.

Menurut **Tuanakotta** dan **Theodorus M** tujuan perlunya suatu pengendalian piutang adalah:

“Supaya piutang yang menjadi hak perusahaan dapat diterima tepat waktu, dan pengendalian tersebut harus benar-benar memadai supaya tidak mengakibatkan kerugian yang besar bagi perusahaan.”

(1997: 170)

Ditinjau dari cara pendekatan manajemen preventif menurut **Willson** dan **Campbell** yang diterjemahkan oleh **Tjintjin Felix Tjendera**, maka ada tiga bidang pengendalian yang umum pada titik mana dapat diambil tindakan untuk mewujudkan pengendalian piutang yaitu :

- “1. Pemberian kredit. Kebijakan pemberian jasa dan syarat penjualan harus tidak menghalangi penjualan kepada para pelanggan yang sehat keadaan keuangannya, dan juga tidak boleh menimbulkan kerugian yang besar karena adanya sanksi yang berlebihan.**
- 2. Penagihan (*Collections*). Apabila telah diberikan jasa, harus dilakukan setiap usaha untuk memperoleh pembayaran yang sesuai dengan syarat penjualan dalam waktu yang wajar.**
- 3. Penetapan dan Penyelenggaraan Pengendalian Internal yang Layak. Meskipun prosedur pemberian jasa dan penagihan telah diadministrasikan dengan baik atau dilakukan secara wajar, ini tidak menjamin adanya pengendalian piutang. Yaitu tidak menjamin ataupun dapat memastikan, bahwa semua penyerahan memang difaktur, atau difaktur sebagaimana mestinya, kepada para pelanggan dan bahwa penerimaan benar-benar masuk ke dalam rekening bank perusahaan. Harus diberlakukan suatu sistem pengendalian internal yang memadai.”**

(1996: 418)

Adapun pengendalian internal yang layak menurut **Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO)** yang diterjemahkan oleh **Amin Widjaja** adalah :

“Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut :

- (a) Efektivitas dan efisiensi operasi**
- (b) Keandalan Pelaporan keuangan**
- (c) Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”**

(2001: 319.2)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan umum dari pengendalian internal yang layak adalah:

1. Efektivitas dan efisiensi operasi.
2. Keandalan Pelaporan keuangan.
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Adapun tujuan pengendalian atas piutang usaha menurut **Elder, Beasley and Arens** yang diterjemahkan oleh **Amir Abadi Jusuf** adalah :

- “1. Piutang usaha pada neraca saldo menurut umur cocok dengan jumlah pada file master dan jumlah total telah ditambahkan dengan tepat dan cocok dengan buku besar (Kecocokan saldo)**
- 2. Piutang usaha yang dicatat adalah ada (keberadaan)**
- 3. Piutang usaha yang ada telah dimasukkan semuanya (kelengkapan).**
- 4. Piutang usaha secara mekanis adalah akurat (akurasi)**
- 5. Piutang usaha diklasifikasikan secara tepat (klasifikasi)**
- 6. Piutang usaha dicatat dalam periode (pisah batas) yang sesuai**
- 7. Piutang usaha dinilai dengan memadai pada nilai yang dapat direalisasikan (nilai yang dapat direalisasi)**
- 8. Piutang usaha benar-benar sah dimiliki klien (hak)**
- 9. Penyajian dan pengungkapan piutang usaha adalah memadai (Penyajian dan pengungkapan).”**

(2002: 434)

Adapun komponen pengendalian internal untuk piutang usaha menurut **Amin Widjaja** adalah:

- “1. Lingkungan pengendalian (*control environment*)**

Faktor-faktor lingkungan pengendalian mencakup integritas, nilai etis, dan kompetensi dari orang entitas; filosofi manajemen dan gaya operasi; cara manajemen memberikan otoritas dan tanggung jawab, dan mengorganisasi dan mengembangkan orangnya; perhatian dan pengarahan yang diberikan dewan komisaris.

2. Penaksiran risiko (*risk assessment*)

Mekanisme yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko yang berkaitan dengan berbagai aktivitas di mana organisasi berkecimpung, termasuk penjualan produksi, pemasaran, dan keuangan.

3. Aktivitas pengendalian (*control activities*)

Pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh manajemen untuk membantu memastikan bahwa tujuan tercapai.

4. Informasi dan komunikasi

Sistem yang memungkinkan orang entitas untuk memperoleh dan menukar informasi yang diperlukan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan operasinya.

5. Pemantauan (*monitoring*)

Proses untuk menilai mutu kinerja sistem sepanjang waktu. Ini dijalankan melalui aktivitas monitoring yang terus menerus, evaluasi yang terpisah atau kombinasi dari keduanya.”

(2005: 71)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan pengendalian piutang ada 5 hal yang harus dilakukan, yaitu :

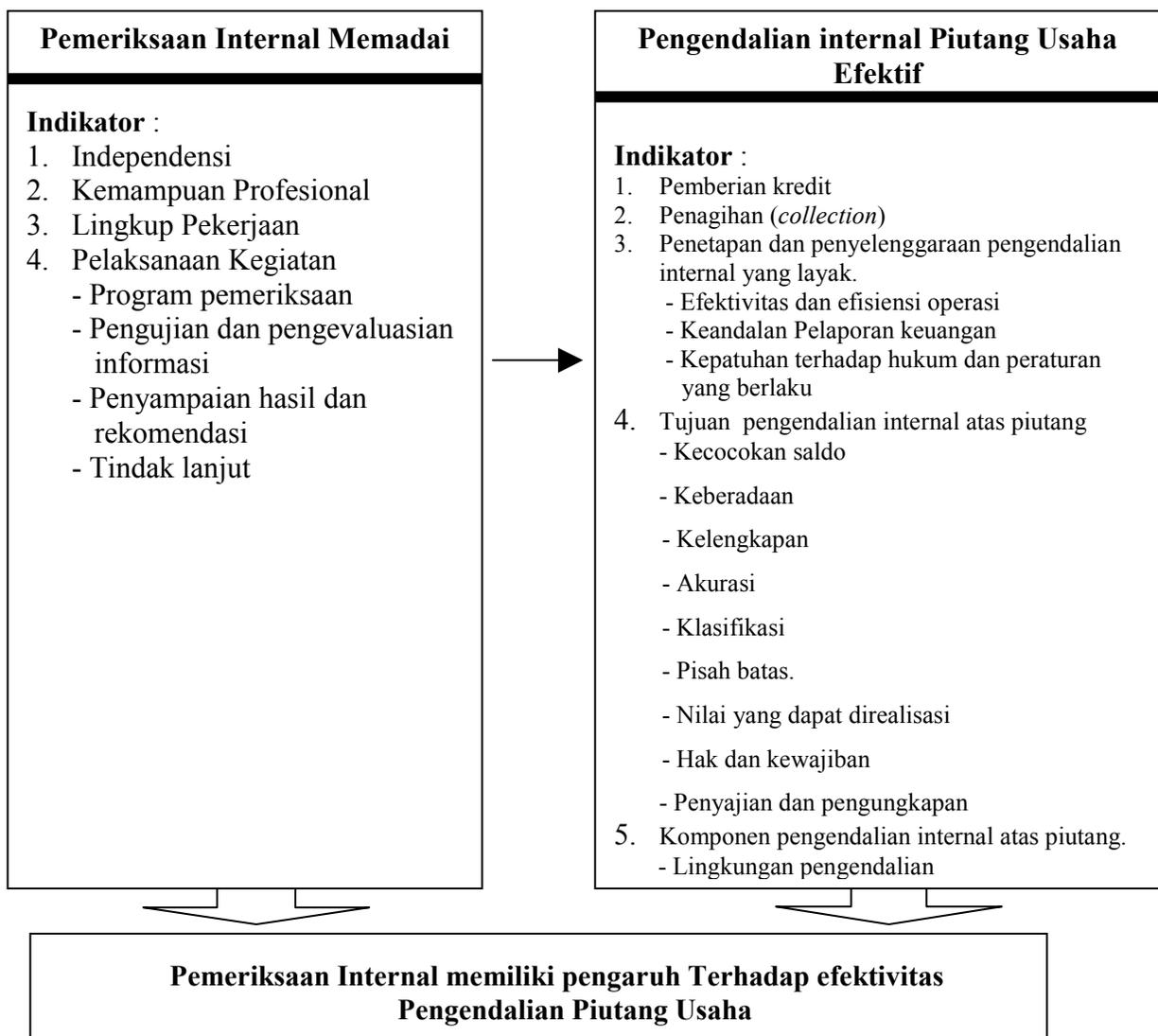
1. Pemberian kredit.
2. Penagihan (*collection*).
3. Penetapan dan penyelenggaraan pengendalian internal yang layak.
4. Tujuan pengendalian internal atas piutang.
5. Komponen pengendalian internal atas piutang.

Pemeriksaan internal harus dapat membantu manajemen dalam meneliti dan mengawasi serta menilai apakah prosedur, metode dan teknik yang menjadi alat dari

pengendalian yang telah ditetapkan itu sudah benar dilaksanakan. Sehingga pihak manajemen khususnya pimpinan dapat mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka penyusun dapat mengambil suatu hipotesis sebagai berikut : “pemeriksaan internal yang dilaksanakan dengan memadai akan berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian piutang usaha.”

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran



1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi dalam penyusunan skripsi ini maka penulis melakukan penelitian di PT. Telekomunikasi Indonesia DIVRE III yang berlokasi di Jln. Supratman No.66A Bandung. Adapun waktu penelitian dimulai pada bulan September 2007 sampai dengan selesai.